E-ISSN: 3032-0933, Volume: 5 Nomor: 2

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ALAT KONTRASEPSI (ALKON) DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KB DI PUSKESMAS INERIE, KABUPATEN NGADA

Lidfina Juwita Ine[1], Ghulam Maulana Ilman[2]
Univeritas 17 Agustus 1945 Surabaya
lidfinaine@gmail.com, ghulamilman@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pelayanan KB di wilayah Puskesmas Inerie, Kabupaten Ngada, menghadapi tantangan geografis yang berisiko menghambat rantai pasok alat kontrasepsi (alkon) dan memicu kekosongan stok (*stockout*). Penelitian ini bertujuan menganalisis alur pendistribusian alkon guna memastikan ketepatan kuantitas dan kualitas logistik dalam mendukung pelayanan KB. Metode yang digunakan adalah partisipasi aktif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui empat fase: perencanaan, verifikasi kualitas berbasis FEFO (*First Expired, First Out*), penyaluran fisik, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan efisiensi waktu penyiapan barang dan akurasi distribusi sebesar 100% tanpa selisih unit antara dokumen permintaan dan fisik alkon. Distribusi tambahan triwulanan ini berhasil menjaga kestabilan pasokan bagi 426 peserta KB aktif di Kecamatan Inerie pada Februari 2026. Pendistribusian alkon telah berjalan baik dan sistematis. Penerapan verifikasi stok dan pengelolaan yang tepat efektif mencegah *stockout* dan menjaga mutu logistik. Disarankan adanya digitalisasi pencatatan logistik untuk meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat sinkronisasi data antara Dinas P2KB dan Puskesmas.
Kata Kunci : Distribusi, Alat Kontrasepsi, Pelayanan KB, Manajemen Logistik, Puskesmas Inerie.

ABSTRACT

Family planning services in the Inerie Community Health Center area, Ngada Regency, face geographical challenges that risk disrupting the contraceptive supply chain (contraceptive devices) and triggering stockouts. This study aims to analyze the distribution flow of contraceptive devices to ensure the accuracy of the quantity and quality of logistics in supporting family planning services. The method used is active participation with a qualitative descriptive approach through four phases: planning, quality verification based on FEFO (First Expired, First Out), physical distribution, and evaluation. The results of the activity showed an increase in the efficiency of goods preparation time and distribution accuracy of 100% with no unit discrepancies between the request document and the physical contraceptive device. This additional quarterly distribution succeeded in maintaining a stable supply for 426 active family planning participants in Inerie District in February 2026. The distribution of contraceptive devices has been running well and systematically. The implementation of stock verification and proper management effectively prevents stockouts and maintains logistics quality. It is recommended to digitize logistics records to minimize manual errors and accelerate data synchronization between the P2KB Office and the Community Health Center.
Keywords: *Distribution, Contraceptive Devices, Family Planning Services, Logistics Management, Inerie Community Health Center*

PENDAHULUAN

Pelayanan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pengendalian penggunaan alat kontrasepsi secara teratur dan berkelanjutan. Pemerintah telah menginisiasi program ini untuk menekan angka pertumbuhan penduduk melalui implementasi Gerakan Keluarga Berencana (KB), yang mendorong penggunaan alat kontrasepsi secara sukarela di kalangan Pasangan Usia Subur (PUS) degan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera guna menunjang pencapaian kualitas sumber daya manusia yang optimal (Nau *et al*.,2024). Program KB juga dipandang sebagai strategi yang efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga serta meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu, anak, dan perempuan .Keberhasilan pelayanan KB sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (Saputra & Novianti, 2020). Namun, kesuksesan indikator-indikator tersebut sangat bergantung pada keandalan sistem pendukung di balik layar, yaitu manajemen rantai pasok dan logistik alat kontrasepsi (alkon). Tanpa adanya jaminan ketersediaan alkon yang stabil, merata, dan tepat sasaran di fasilitas kesehatan tingkat pertama, pelayanan KB kepada masyarakat akan mengalami hambatan serius berupa kekosongan stok (*stockout*). Fenomena kekosongan stok (*stockout*) dapat menghambat keberlangsungan pelayanan KB serta menyebabkan akseptor mengalami keterlambatan penggunaan kontrasepsi (Wulandari *et al*,2022).

Kabupaten Ngada, khususnya wilayah kerja Puskesmas Inerie, memiliki karakteristik geografis yang cukup menantang. Wilayah ini didominasi oleh topografi berbukit-bukit, akses jalan yang membutuhkan waktu tempuh ekstra (Nau *et al*.,2024). Kondisi geografis ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi tata kelola logistik kesehatan. Proses distribusi dari gudang alkon Dinas P2KB terkait menuju fasilitas kesehatan masyarakat kerap kali mengalami hambatan rantai pasok jika tidak dikelola dengan perencanaan yang matang. Di sisi lain, Pasangan Usia Subur (PUS) di kawasan pedesaan seperti Inerie sangat bergantung pada ketersediaan metode kontrasepsi baik jangka pendek seperti suntik dan pil, maupun Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan dan IUD yang disediakan secara gratis atau bersubsidi oleh pemerintah di Puskesmas. Keterlambatan atau ketidakakuratan data dalam pendistribusian alkon dapat menghambat keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah kerja Puskesmas Inerie. Oleh karena itu, efisiensi tata kelola distribusi yang mencakup proses penyiapan, pengecekan kualitas dan kuantitas, hingga penyaluran fisik alkon menjadi sangat penting untuk dipelajari, dioptimalkan, dan dilaporkan secara rill sesuai dengan keadaan di lapangan.

Urgensi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berakar pada masalah klasik logistik, yaitu sering terjadinya ketidaksesuaian dan selisih antara data

kebutuhan alkon yang dilaporkan secara administratif dengan kebutuhan riil akseptor di lapangan. Proses pengecekan manual di puskesmas yang kurang teliti akibat keterbatasan jumlah personel pencatat, atau keterlambatan sinkronisasi data administrasi pada rantai pasok, dapat mengakibatkan penumpukan stok (*overstock*) di satu unit pelayanan, atau justru kelangkaan fatal (*stockout*) di unit pelayanan lainnya (Suriyati *et al*., 2017) Oleh karena itu penting untuk melakukan intervensi langsung pada setiap fasilitas kesehatan . Kegiatan ini merupakan pengabdian nyata guna mempercepat alur distribusi logistik agar layanan kontrasepsi di masyarakat tidak terputus, yang menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan KB kepada masyarakat. Untuk mengatasi potensi hambatan distribusi logistik alkon di Puskesmas Inerie, rencana pemecahan masalah yang diterapkan dalam kegiatan ini dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan operasional:

1. Penerapan Verifikasi Stok: Mengimplementasikan proses pencocokan ketat dua arah antara lembar jumlah permintaan, kartu stok fisik gudang, dan kondisi fisik alkon (jumlah unit, keutuhan kemasan, dan nomor bets) sebelum barang dimuat ke sarana transportasi distribusi. Pencatatan pada kartu stok harus dilakukan secara rutin dari hari ke hari, setiap terjadi mutasi obat. Stok obat yang ada di gudang harus selalu sesuai dengan kartu stok (Mahalia,2017)
2. Optimasi Manajemen Penyimpanan Sementara (FEFO): Membantu pengelola obat puskesmas dalam menata ulang alkon tempat penyimpanan dengan menggunakan prinsip *First Expired, First Out* (FEFO). Penataan obat digudang dengan sistem FIFO dan FEFO akan menjamin kualitas pengelolaan barang lebih efisien (Mahalia,2017). Prinsip FIFO dan FEFO dalam penyusunan obat yaitu obat dengan masa kadaluarsa lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal Langkah ini dilakukan guna memastikan alat kontrasepsi dengan masa kedaluwarsa terdekat diposisikan di baris terdepan untuk didistribusikan terlebih dahulu demi menghindari kerugian material akibat barang kedaluwarsa.
3. Sinkronisasi Data Sasaran dan Alokasi Riil: Menyesuaikan jumlah pasokan alkon yang akan disalurkan dengan jumlah kunjungan PUS bulanan dan capaian penggunaan KB aktif di Puskesmas Inerie, sehingga pola distribusi bersifat responsif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan (*demand-driven supply*). Untuk menghindari dari penumpukan alkon diperlukannya suatu sistem manajemen untuk dapat melihat stok alkon berdasarkan penerimaan dan pengeluaran alkon yang dilakukan setiap bulan-bulan sebelumnya. Penyimpanan alkon bisa dilakukan dengaan proses manajemen karena selama penyimpanan alkon memastikan tersedianya alkon di gudang, kualitas alkon, kegunaan alkon bagi pengguna (Damaidayona,2024)

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program magang ini bertujuan untuk menganalisis alur pendistribusian alat kontrasepsi (alkon) dari tahap penyiapan

hingga penyaluran akhir guna memastikan ketepatan kuantitas dan kualitas logistik dalam mendukung pelayanan KB di wilayah kerja Puskesmas Inerie, Kabupaten Ngada.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian berbasis magang ini adalah Metode Partisipasi Aktif yang dengan menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif Kualitatif. Melalui metode ini, penulis tidak hanya bertindak sebagai pengamat eksternal, melainkan terlibat langsung secara fisik, teknis, dan administratif dalam alur distribusi logistik alkon. Aktivitas lapangan ini berlokasi di, gudang logistik. Keluarga Berencana (KB), serta unit pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) Puskesmas Inerie, Kabupaten Ngada. Secara sistematis, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan distribusi logistik alkon ini dibagi menjadi empat fase utama yang saling berkesinambungan:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan
   Tahap ini meliputi pengumpulan data sekunder mengenai jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) aktif, tren peminatan masyarakat terhadap jenis alkon tertentu (Pil, Suntik 1 Bulan, Suntik 3 Bulan, Implan, IUD, Kondom), serta menganalisis laporan sisa stok (*sisa opname*) dari bulan sebelumnya. Data yang terkumpul kemudian dijadikan sebagai basis proyeksi penentuan kuantitas alkon yang harus disiapkan agar tidak terjadi kelebihan permintaan.
2. Tahap Verifikasi dan Pengecekan Kualitas
   Proses verifikasi ini melibatkan pemeriksaan visual terhadap kemasan luar untuk memastikan tidak ada kerusakan segel, kebocoran cairan (untuk kontrasepsi suntik), atau cacat fisik pada alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dan implan. Selanjutnya, dilakukan pemilahan berbasis tanggal kedaluwarsa sesuai asas FEFO (*First Expired, First Out*).
3. Tahap Penyaluran Fisik
   Setelah dokumen administrasi dan fisik barang dinyatakan sinkron (tidak ada selisih), dilakukan proses pengemasan (*packing*) menggunakan wadah yang aman. Pengemasan ini penting untuk melindungi alkon dari paparan panas matahari langsung atau guncangan mekanis selama perjalanan, mengingat kondisi infrastruktur jalan dan topografi Kecamatan Inerie yang berliku dan menanjak. Kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan produk farmasi harus dapat melindungi produk dan mencegah paparan yangdapat mengkontaminasi dan mempengaruhi stabilitas produk, serta efek lain yang dapat merugikan kualitasp roduk yang didistribusikan (Mahalia,2017)
4. Tahap Evaluasi dan Rekonsiliasi
   Tahap akhir dilakukan dengan melakukan pengisian kartu stok gudang secara

riil (*real-time updating*) guna mencatat pengurangan jumlah barang. Tahap evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan rencana logistik, dan evaluasi berkala untuk menjaga program kinerja dan memastikan perbaikan monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai ketersediaan, kondisi, dan penggunaan alkes. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik, laporan penggunaan alkes, dan analisis data inventaris. (Ramadhan, 2020). Selain itu, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang oleh pihak pengirim yaitu staf Dinas P2KB yang mengantarkan alkon dan pihak penerima pelayanan yaitu staf puskesmas, kemudian melakukan konfirmasi ulang pasca penyaluran untuk memastikan bahwa seluruh logistik telah diterima dalam jumlah utuh dan siap digunakan untuk pelayanan KB langsung kepada masyarakat pengguna KB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang berfokus pada pendistribusian alat kontrasepsi (alkon) di Puskesmas Inerie berhasil diselesaikan dengan capaian target yang optimal. Melalui keterlibatan penulis dalam pengabdian masyarakat berbasis partisipasi aktif ini, beberapa luaran konkret dan peningkatan efisiensi yang berhasil dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi Waktu Operasional Penyiapan: Proses penyiapan barang dari gudang penyimpanan hingga siap dimuat ke kendaraan distribusi mengalami reduksi waktu yang signifikan. Penataan ulang ruang simpan dengan pengelompokan komoditas berdasarkan jenis alkon mempercepat staf dalam melakukan pencarian barang.
2. Tingkat Akurasi Distribusi : Berdasarkan hasil pencocockan akhir antara Surat Permintaan Barang yang diajukan oleh unit pelayanan dengan fisik alkon yang diserahkan, tidak ditemukan adanya selisih satu unit pun. Seluruh jenis alkon (Suntikan KB, Pil KB, Implan, dan IUD) terdistribusi dalam jumlah yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan riil akseptor.



Gambar 1. Kegiatan Pendistribusian Alkon di Puskesmas Inerie

Keberhasilan pendistribusian logistik alkon yang tepat waktu, tepat jumlah, dan berkualitas sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan KB

kepada masyarakat. Ketika proses penyiapan, pengecekan kualitas, dan penyaluran fisik alkon berjalan dengan lancar tanpa hambatan, Puskesmas Inerie dapat memberikan jaminan kepastian bagi Pasangan Usia Subur (PUS) bahwa pilihan metode kontrasepsi mereka selalu tersedia setiap kali mereka datang berkunjung. Hal ini membantu mencegah terjadinya fenomena drop-out KB akibat keterbatasan stok alat kontrasepsi. Fenomena *drop-out* KB adalah suatu kondisi buruk di mana seorang akseptor aktif terpaksa menghentikan penggunaan kontrasepsi bukan karena keinginan pribadi untuk memiliki anak lagi, melainkan karena stok alkon di fasilitas kesehatan atau bidan desa sedang kosong (*stockout*). Dampak yang dirasakan akibat perubahan pola pelayanan menghadirkan resiko besar bagi kesehatan dan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan layanan dan produk penggunaan kontrasepsi (Maydiansari *et al*,2023). Fenomena *drop-out* yang dipicu oleh kegagalan sistem logistik merupakan salah satu kontributor terbesar bagi tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan. Melalui kegiatan pendistribusian yang terencana, ketersediaan alat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat tetap terjaga. Selain aspek ketepatan waktu, ketepatan distribusi berbasis sinkronisasi data memastikan tidak terjadinya fenomena maldistribusi logistik.

Tingginya jumlah peserta KB aktif menjadi salah satu dasar dilaksanakannya pendistribusian alat kontrasepsi (alkon) dalam kegiatan ini. Jumlah distribusi alkon yang dilakukan bukan merupakan distribusi utama tahunan, melainkan distribusi tambahan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk menjaga kestabilan persediaan logistik KB agar pelayanan kontrasepsi tetap berjalan tanpa mengalami kekosongan stok (stockout). Distribusi tambahan ini sangat penting karena penggunaan alat kontrasepsi oleh masyarakat berlangsung secara terus-menerus dan rutin, sehingga persediaan alkon di fasilitas pelayanan kesehatan harus selalu tersedia sesuai kebutuhan akseptor.

Tabel 1. Jumlah Peserta KB Aktif Puskesmas Inerie Bulan Februari 2026

Prov: Nusa Tenggara Timur
Kab : Ngada

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VESEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(4-11)	13

1	AIMERE	689	227	53	5	294	15	0	63	0	657	32
2	GOLEWA	722	278	117	10	172	25	0	104	1	707	15
6	BAJAWA	1893	615	192	13	553	145	2	321	6	1847	46
7	SOA	900	185	75	7	474	32	3	65	1	842	58
9	RIUNG	753	300	71	0	258	10	0	91	3	733	20
12	JEREBUU	411	114	95	14	129	4	0	52	0	408	3
14	RIUNG BARAT	575	335	43	0	145	5	0	44	0	572	3
15	BAJAWA UTARA	772	136	4	4	528	25	0	60	0	757	15
16	WOLOMEZE	443	110	48	1	216	6	3	52	0	436	7
18	GOLEWA SELATAN	599	178	14	1	169	73	1	110	0	546	53
19	GOLEWA BARAT	666	195	25	6	302	27	0	100	2	657	9
20	INERIE	426	79	113	0	142	30	0	49	0	413	13
JUMLAH TOTAL		8849	2752	850	61	3382	397	9	1111	13	8575	274

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada

Berdasarkan Tabel 1 mengenai jumlah peserta KB aktif bulan Februari 2026 di Kabupaten Ngada, Kecamatan Inerie tercatat memiliki sebanyak 426 peserta KB aktif dengan penggunaan berbagai metode kontrasepsi modern. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu implan sebanyak 142 akseptor, pil KB sebanyak 113 akseptor, suntik sebanyak 79 akseptor, IUD sebanyak 30 akseptor, serta tubektomi sebanyak 49 akseptor. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana (KB) di wilayah kerja Puskesmas Inerie tergolong cukup tinggi dan membutuhkan ketersediaan alat kontrasepsi yang stabil serta berkelanjutan. Dalam kegiatan yang dilakukan jumlah

alkon yang didistribusikan terdiri dari suntik sebanyak 50 unit, Kondom sebanyak 1 lusin (12 buah), implan sebanyak 10 unit. Melalui distribusi tambahan ini, Puskesmas Inerie dapat mempertahankan ketersediaan berbagai jenis alat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama untuk metode kontrasepsi yang memiliki jumlah pengguna cukup tinggi seperti implan, pil KB, dan suntik.

Kegiatan pendistribusian alkon yang dilakukan di Puskesmas Inerie bukan sekadar aktivitas logistik mekanis, melainkan sebuah wujud nyata dari pemenuhan Teori Pelayanan Publik. Menurut Dwiyanto (2015), pelayanan publik merupakan upaya komprehensif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara transparan, akuntabel, responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Secara yuridis, intervensi logistik ini merupakan implementasi langsung dari kebijakan lokal, yaitu Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada. Perbup ini mengamanatkan kewajiban Dinas P2KB dalam mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Dengan memastikan rantai pasok alkon berjalan tanpa interupsi di Puskesmas Inerie pada tahun 2026 ini, kegiatan magang pengabdian masyarakat ini telah berkontribusi nyata dalam menerjemahkan regulasi menjadi sebuah pelayanan publik yang rill, terstruktur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian di Puskesmas Inerie, dapat disimpulkan bahwa proses pendistribusian alat kontrasepsi (alkon) telah berjalan dengan baik melalui tahapan perencanaan, verifikasi, penyaluran, hingga evaluasi logistik secara sistematis. Distribusi alkon yang dilakukan merupakan distribusi tambahan setiap 3 bulan sekali untuk menjaga kestabilan persediaan logistik KB di Puskesmas Inerie agar pelayanan kontrasepsi tetap berjalan tanpa mengalami kekosongan stok. Tingginya jumlah peserta KB aktif di Kecamatan Inerie menunjukkan bahwa ketersediaan alkon sangat penting dalam mendukung keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat. Selain itu, penerapan sistem verifikasi stok dan metode FEFO membantu menjaga ketepatan distribusi serta kualitas alat kontrasepsi yang disalurkan.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlunya peningkatan koordinasi antara Dinas P2KB dan pihak puskesmas agar perlunya penguatan sistem administrasi dan digitalisasi pencatatan logistik untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual dan mempercepat sinkronisasi data stok. Puskesmas juga diharapkan terus

menerapkan prinsip FEFO secara konsisten serta melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi fisik alkon guna menjaga kualitas barang sebelum digunakan oleh Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, A. (2020). MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN PUBLIK.*POPUL ASI*, 13(1), 2020. Retrieved from https://journal.ugm.ac.id/populasi/article/view/11830

Indonesia, (2019). Undang undang (UU) Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada. Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-20019

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Modul Pelatihan Manajemen Logistik Alat Kontrasepsi bagi Pengelola Logistik KB*. Jakarta: Direktorat Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, BKKBN.

Nau.M.D., Nayoan,C.R.,& Sir, A.B. (2024). Description of the Characteristics of Long Acting Contraceptive Method Users in the Working Area of Aimere Health Center, Ngada Regency. *Timorese Journal Of Public Health*,6(4).https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/TJPH/article/view/10421/7980

Mahalia, L.D. (2017).Analisis Peyimpanan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Pemerintah Di Kota Palangkaraya.Jurnal Forum Kesehatan:*Media Publikasi Kesehatan*.Ilmiah,7(2).https://ejournal.polkesraya.ac.id/index.php/jfk/issue/view/10

Maydianasari, L., Wantini, N. A., Rahmuniyati, M. E., Handayani, F., & Maranressy, M. (2023). Faktor penentu berhenti pakai (drop out) alat kontrasepsi pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati*, 8(2)

Ramadhan, F. (2020). Manajemen Logistik Alat Kesehatan di Puskesmas. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(2), 212–214.

Saputra, A., & Novianti, L.(2020). Hubungan ketersediaan alat kontrasepsi terhadap penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. *Jurnal Multiscience*, X(2),93.https://jurnal.stiksitikhadijah.ac.id/index.php/multiscience/article/view/290

Wulandari, et al (2022). Studi kasus kebijakan publik DKI. Jakarta, Indonesia: *BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Paramadina*.https://repository.paramadina.ac.id/723/2/Studi%20Kasus%20Kebijakan%20Publik%20di%20DKI%20-%20Gerakan%20Cegah%20Putus%20KB.pd